

ABSTRAK

Kepailitan merupakan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan milik debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Hakim Pengawas, dimana pengelolaan dan pemberesan harta pailit tersebut dilakukan oleh seorang atau lebih Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam hal pemberesan harta pailit milik debitur, menurut pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Masalah yang dibahas penulis dalam tesis ini adalah tentang peralihan harta pailit yang dijual di luar penjualan lelang, yaitu dijual dibawah tangan oleh kurator, dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas. Untuk dapat menganalisa pada permasalahan tesis ini, metode pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah metode pendekatan masalah yang terdiri atas pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dengan adanya pendekatan tersebut, selanjutnya dikaitkan antara permasalahan yang ada dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dianalisis berdasarkan pada pendapat-pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum perdata.

Berdasarkan pada metode-metode yang digunakan dalam permasalahan tesis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa harta pailit wajib dijual di muka umum / secara lelang di hadapan Pejabat Lelang, dan menurut pada pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tapi jika tidak berhasil maka dapat dijual dibawah tangan oleh kurator dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas.

Kata Kunci : Kepailitan, Penjualan Dibawah Tangan, Penjualan Lelang